

Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara

Andhika Purnama Ndongu

Program Sarjana Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Hasanuddin

Email: purnamaandhika590@gmail.com

Abstract

Tourism is a strategic sector that plays an important role in promoting regional economic growth, improving community welfare, and preserving cultural and environmental resources. Muna Regency possesses several leading tourist destinations, including Napabale Lake and Walengkabola Beach, which offer significant natural and cultural attractions. However, the development of these tourist destinations still faces various challenges, such as limited infrastructure, supporting facilities, accessibility, and tourism promotion. This study aims to analyze the role of the Muna Regency Government in the development of tourist destinations in Muna Regency. This study employed a qualitative descriptive approach using a case study strategy. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation. The research informants consisted of officials from the Tourism and Creative Economy Office, tourism destination managers, and local community members around the tourist areas. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that the Muna Regency Government has played an active role in tourism destination development through efforts to create tourism attractions, provide tourism facilities, improve accessibility, and create tourism-related business opportunities for local communities. The development of tourism attractions has been carried out through destination promotion and the organization of cultural events. The provision of tourism facilities has been implemented through the development of supporting infrastructure, while accessibility improvements have been achieved through infrastructure enhancement and easier access to tourist destinations. In addition, the government has encouraged community participation in tourism-based economic activities. Nevertheless, tourism destination development still faces challenges, including inadequate facilities and infrastructure, suboptimal accessibility, and tourism promotion efforts that require further improvement.

Keywords: Local Government Role, Tourism Destination Development, Tourism.

Abstrak

Pariwisata merupakan sektor strategis yang memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta melestarikan potensi budaya dan lingkungan. Kabupaten Muna memiliki berbagai destinasi wisata unggulan, seperti Danau Napabale dan Pantai Walengkabola, yang memiliki daya tarik alam dan budaya yang besar. Namun, pengembangan destinasi wisata tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan infrastruktur, fasilitas pendukung, aksesibilitas, dan promosi wisata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Daerah Kabupaten Muna dalam pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Muna. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan strategi studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas pejabat Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, pengelola destinasi wisata, serta masyarakat sekitar kawasan wisata. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Muna telah berperan dalam pengembangan destinasi wisata melalui upaya mewujudkan atraksi wisata, menyediakan fasilitas kepariwisataan, meningkatkan aksesibilitas, dan menciptakan peluang usaha jasa kepariwisataan

bagi masyarakat. Pengembangan atraksi wisata dilakukan melalui promosi destinasi dan penyelenggaraan kegiatan budaya. Penyediaan fasilitas kepariwisataan dilakukan melalui pembangunan sarana pendukung wisata, sementara peningkatan aksesibilitas diwujudkan melalui perbaikan infrastruktur dan kemudahan akses menuju destinasi wisata. Selain itu, pemerintah juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi berbasis pariwisata. Meskipun demikian, pengembangan destinasi wisata masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sarana dan prasarana, aksesibilitas yang belum optimal, serta promosi wisata yang masih perlu ditingkatkan.

Kata kunci: *Peran Pemerintah Daerah, Pengembangan Destinasi Wisata, Pariwisata.*

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan keanekaragaman hayati, budaya, dan potensi wisata yang melimpah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pariwisata merupakan kegiatan yang didukung oleh fasilitas dan pelayanan dari masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Pariwisata juga menjadi sektor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah melalui penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha, serta pelestarian budaya dan lingkungan.

Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, memiliki potensi besar di sektor pariwisata dengan destinasi seperti Danau Napabale dan Pantai Walengkabola. Namun, pengelolaan destinasi ini masih menghadapi tantangan seperti aksesibilitas yang terbatas, kurangnya infrastruktur, dan minimnya promosi wisata. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab penting dalam mengembangkan sektor pariwisata melalui kebijakan strategis yang terintegrasi.

Berdasarkan hasil observasi dan pengamatan awal penulis bahwa Danau Napabale masih menuai banyak masalah salah satunya sarana dan prasarana yang kurang mendukung misalnya akses menuju lokasi wisata masih terhambat (jalanan rusak), kurangnya rumah makan dan tempat ibadah, minimnya fasilitas Listrik di lokasi wisata, serta

belum memadainya jaringan informasi sehingga dengan terbatasnya jaringan informasi membuat lokasi tersebut hanya dapat di kunjungi oleh masyarakat lokal.

Selain Danau Napabale, terdapat destinasi alam lain yang sangat menarik untuk dikunjungi, yaitu Pantai Walengkabola. Sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021-2036, Pantai Walengkabola merupakan salah satu lokasi yang dianggap strategis dalam tahap awal pembangunan pariwisata. Pantai ini terletak di Desa Oempu, Kecamatan Tongkuno, sekitar 69 KM dari Kota Raha, ibu kota Kabupaten Muna. Perjalanan dari Kota Raha ke Pantai Walengkabola dapat ditempuh dalam waktu sekitar 1 jam 30 menit menggunakan kendaraan pribadi seperti mobil atau motor.

Pantai Walengkabola menawarkan panorama Pantai yang indah serta sejuk yang merupakan hamparan pasir putih dan pertemuan antara air laut dengan air tawar, hamparan vegetasi seperti rumput laut yang melimpah dan tebing karang yang indah, dihiasi dengan berbagai jenis tumbuhan pantai di atasnya. Penataan lokasi yang dilengkapi gazebo-gazebo memberikan tempat bagi wisatawan untuk bersantai sambil menikmati keindahan panorama pantai, semakin menonjolkan pesona alam sekitar Pantai Walengkabola.

Pantai Walengkabola menjadi tujuan wisata bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Wisatawan lokal, umumnya berasal dari daerah sekitar, mengunjungi pantai ini untuk tujuan rekreasi. Sementara

itu, wisatawan mancanegara tidak hanya datang untuk berlibur, tetapi juga memiliki berbagai tujuan lain, seperti melakukan penelitian tentang budaya setempat. Kearifan lokal di sekitar Pantai Walengkabola menjadi daya tarik tersendiri. Hal ini disebabkan oleh masyarakat setempat yang masih mempertahankan gaya hidup tradisional, sehingga kearifan lokal di kawasan ini tetap terjaga dan dilestarikan hingga kini. Salah satu kearifan lokal yang menonjol adalah proses pembuatan sarung tenun khas Muna yang masih menggunakan cara-cara tradisional. Waktu terbaik untuk mengunjungi Pantai Walengkabola adalah saat libur nasional serta saat libur hari raya.

Namun demikian, Pantai ini masih belum mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah, terutama dalam hal pengembangan sarana dan prasarana. Misalnya, belum tersedianya fasilitas seperti kamar ganti, fasilitas Listrik di Lokasi Pantai, tidak terawatnya gazebo, tidak adanya bak sampah, akses jalan di Pantai belum memadai, serta ketiadaan kepengurusan kelompok pemuda sadar wisata (Pokdarwis). Pantai ini juga dikenal dengan nuansa mistiknya karena bersampingan dengan makam orang zaman dahulu kala yang menghuni Pantai ini. Hal tersebut juga di dukung penjelasan dari para pengelola destinasi masing-masing wisata yang mengungkapkan bahwa:

"Pamarintah harusuno daghumandofaane dua, kaembale mbalehano destinasi wisata, so nokesagho dua maka nembali kaembungano mata nemata mie bhari, bahi derabuane strategi pemasaran, dae pokadulu gho bhe kantori2, dae rabu kerja sama, so nae tangkaho dua wisata. Ane dua pamarinta ne fooawagho dua anggara so damakatahie bahi, kaembalihano wisata mie bari, maka derabuane dua pelatihan bhe sosailisasi welo kaelolaha wisata, so naembaligho wisata su tewisehino."

(Pemerintah seharusnya memperhatikan sarana dan prasarana disekitar tempat

destinasi wisata sehingga para wisatawan merasa nyaman dan wisatawan luar tertarik berkunjung ke destinasi wisata ini, selain itu pula pemerintah perlu melakukan langkah-langkah taktis untuk menarik wisatawan luar seperti strategi promosi di berbagai kota pada saat kegiatan-kegiatan besar, bukan hanya para pengelola destinasi wisata yang bekerja dalam memikat hati para pengunjung destinasi wisata tetapi pemerintah turut andil. Selain itu pemerintah perlu memberikan anggaran yang cukup dalam pengelolaan destinasi wisata, serta memberikan pelatihan maupun sosialisasi dalam pengelolaan destinasi wisata sehingga destinasi wisata ini berkelanjutan).

Dari penjelasan diatas, Pemerintah Daerah mempunyai peran penting dalam mengembangkan objek wisata. Untuk itu di perlukan tindakan yang tepat oleh Pemerintah Kabupaten Muna yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021-2036, Pasal 24 ayat (1) huruf d yang berbunyi Pembangunan sarana umum dan fasilitas kepariwisatawan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan strategi studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Informan penelitian meliputi pejabat Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, pengelola destinasi wisata, dan masyarakat setempat. Teknik analisis data melibatkan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi untuk menghasilkan kesimpulan yang valid.

Lokasi penelitian berfokus pada Danau Napabale dan Pantai Walengkabola di Kabupaten Muna. Penelitian berlangsung selama dua bulan, dengan data yang dikumpulkan secara purposive sampling untuk memastikan relevansi informasi yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola dan mengembangkan destinasi wisata di Kabupaten Muna. Sebagai daerah yang kaya akan potensi pariwisata, Kabupaten Muna memiliki berbagai destinasi yang unik, baik berupa keindahan alam maupun kekayaan budaya. Pengelolaan potensi ini membutuhkan perencanaan strategis dan pelaksanaan yang tepat agar dapat memberikan dampak yang positif, tidak hanya bagi sektor ekonomi, tetapi juga bagi masyarakat setempat.

Sebagai pemangku kepentingan utama, Pemerintah Daerah Kabupaten Muna bertanggung jawab untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan sektor pariwisata. Dalam hal ini, pemerintah melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memiliki peran untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan destinasi wisata, peningkatan kualitas daya tarik wisata, serta pengembangan fasilitas yang memadai. Selain itu, keberhasilan pengelolaan pariwisata di Kabupaten Muna juga ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah untuk menjalin sinergi antara berbagai pihak, baik itu sektor swasta, komunitas lokal, maupun wisatawan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Muna tidak hanya berfokus pada pengembangan destinasi wisata yang sudah ada, tetapi juga berupaya menciptakan peluang baru yang mampu menarik lebih banyak wisatawan, baik lokal maupun internasional. Hal ini dilakukan dengan memberikan perhatian pada aspek infrastruktur, pemasaran, dan pengembangan ekonomi kreatif masyarakat setempat. Strategi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengembangan sektor pariwisata dapat memberikan manfaat jangka panjang, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian, pengelolaan pariwisata di Kabupaten Muna juga menghadapi

berbagai tantangan. Beberapa destinasi seperti Danau Napabale dan Pantai Walengkabola, misalnya, masih memiliki keterbatasan dalam hal infrastruktur, aksesibilitas, dan promosi. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang lebih strategis dari Pemerintah Daerah untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, seperti perbaikan fasilitas umum, peningkatan akses jalan menuju destinasi, dan promosi yang lebih intensif di tingkat nasional maupun internasional.

Dalam konteks pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, Pemerintah Daerah juga perlu memperhatikan kelestarian lingkungan dan kearifan lokal. Upaya pengembangan destinasi wisata harus dilakukan dengan pendekatan yang memperhatikan aspek sosial, budaya, dan lingkungan sehingga dapat menciptakan harmoni antara kebutuhan wisatawan dan masyarakat lokal. Dengan demikian, pariwisata tidak hanya menjadi mesin penggerak ekonomi, tetapi juga menjadi sarana untuk mempromosikan identitas dan kebanggaan daerah.

Melalui kerangka kerja yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2021–2036, Pemerintah Kabupaten Muna telah menetapkan strategi untuk mendukung pembangunan destinasi wisata yang terintegrasi. Strategi ini mencakup peningkatan atraksi wisata, penyediaan fasilitas kepariwisataan, peningkatan aksesibilitas, serta penciptaan peluang jasa usaha pariwisata bagi masyarakat. Dengan peran aktif Pemerintah Daerah, diharapkan sektor pariwisata Kabupaten Muna dapat berkembang menjadi sektor unggulan yang berdaya saing, berkelanjutan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Mewujudkan Atraksi Wisata

Mewujudkan atraksi wisata adalah salah satu tanggung jawab utama Pemerintah

Daerah dalam mendorong pengembangan sektor pariwisata. Atraksi wisata menjadi elemen kunci dalam menarik wisatawan, karena berfungsi sebagai daya tarik utama yang memberikan pengalaman unik dan berkesan. Sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2021–2036, pembangunan atraksi wisata diarahkan untuk memanfaatkan dan mengembangkan keunikan budaya serta keindahan alam lokal yang khas.

Atraksi wisata mencakup berbagai aspek yang dapat menarik minat wisatawan, baik berupa daya tarik alam, atraksi budaya, maupun hasil inovasi buatan manusia. Menurut Cooper dkk (1993), atraksi wisata terdiri dari tiga komponen utama, yaitu keunikan daya tarik berbasis alam, keindahan budaya lokal, dan fasilitas penunjang yang dirancang untuk meningkatkan pengalaman wisatawan. Dalam konteks Kabupaten Muna, pemerintah daerah diharapkan mampu mengidentifikasi, mengelola, dan mempromosikan atraksi-atraksi yang berbasis pada potensi lokal seperti Danau Napabale dan Pantai Walengkabola.

Teori yang dikemukakan oleh Pitana (2005) juga menegaskan bahwa atraksi wisata tidak hanya berfungsi sebagai daya tarik rekreasi, tetapi juga sebagai sarana untuk melestarikan budaya dan tradisi lokal. Pengembangan atraksi wisata harus didasarkan pada prinsip keberlanjutan, yaitu menjaga keseimbangan antara kebutuhan wisatawan, kesejahteraan masyarakat lokal, dan kelestarian lingkungan. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Muna memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa pengelolaan atraksi wisata dilakukan dengan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat setempat.

Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2022 juga menekankan

pentingnya menciptakan struktur dan perwilayahan atraksi wisata yang saling mendukung berdasarkan karakteristik setempat. Atraksi wisata di setiap lokasi harus dirancang dengan memperhatikan potensi lokal yang spesifik, seperti keindahan danau air asin di Danau Napabale atau nilai budaya seperti tradisi menenun kain khas di sekitar Pantai Walengkabola. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan pengalaman wisata yang autentik dan mendalam bagi wisatawan.

Selain itu, mewujudkan atraksi wisata juga mencakup pengembangan program-program kreatif yang mampu meningkatkan daya tarik destinasi. Hal ini sejalan dengan teori Sobari dalam Anindita (2015), yang menyebutkan bahwa atraksi wisata harus didukung oleh kegiatan-kegiatan yang inovatif, seperti festival budaya, olahraga air, atau atraksi ekowisata yang melibatkan wisatawan dalam pelestarian lingkungan. Dengan demikian, atraksi wisata tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga edukasi yang memberikan nilai tambah kepada wisatawan.

Dalam pengembangan atraksi wisata, Pemerintah Daerah Kabupaten Muna juga perlu memperhatikan aspek pemasaran dan branding destinasi. Promosi yang terencana dan terarah sangat penting untuk meningkatkan visibilitas atraksi wisata di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini sesuai dengan strategi pengembangan pariwisata dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, yang menggarisbawahi pentingnya pemasaran sebagai bagian integral dari pengelolaan atraksi wisata.

Dengan landasan teori dan regulasi yang kuat, Pemerintah Daerah Kabupaten Muna diharapkan dapat memainkan peran optimal dalam mewujudkan atraksi wisata yang menarik dan berkelanjutan. Atraksi wisata yang dirancang dengan baik tidak hanya menjadi mesin penggerak utama sektor pariwisata, tetapi juga menjadi sarana untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melestarikan kekayaan budaya serta lingkungan Kabupaten Muna.

mewujudkan atraksi wisata di Kabupaten Muna memerlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, pengelola destinasi wisata, dan masyarakat sekitar.

Pemerintah berperan aktif dalam bekerja sama dengan komunitas wisata untuk mempromosikan destinasi wisata seperti Danau Napabale melalui berbagai media dan acara lokal. Langkah ini bertujuan meningkatkan daya tarik destinasi serta memperkenalkan keunikan lokal kepada wisatawan. Selain itu, pengelola destinasi wisata Pantai Walengkabola menekankan pentingnya acara tahunan, seperti lomba perahu tradisional dan pameran seni, yang dapat menjadi daya tarik khas serta mendukung pelestarian budaya lokal. Acara ini juga memiliki potensi untuk meningkatkan keterlibatan pelaku seni dan usaha kecil dalam kegiatan pariwisata.

Dari perspektif masyarakat, pengembangan atraksi wisata harus memberikan manfaat langsung bagi mereka, terutama melalui peluang usaha mikro seperti kios makanan, penyewaan alat rekreasi, atau penjualan kerajinan tangan. Pelibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan dan promosi wisata dianggap penting untuk menciptakan rasa kepemilikan serta mendukung keberlanjutan pengembangan destinasi wisata.

Menyediakan Fasilitas Kepariwisata

Penyediaan fasilitas kepariwisataan merupakan elemen penting dalam mendukung kenyamanan dan pengalaman wisatawan saat mengunjungi destinasi wisata. Fasilitas ini mencakup berbagai infrastruktur dan layanan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan wisatawan selama mereka berada di lokasi wisata. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun

2021–2036, penyediaan fasilitas kepariwisataan menjadi salah satu prioritas dalam pengembangan destinasi wisata untuk meningkatkan daya tarik serta daya saing daerah.

Menurut Cooper dkk (1993), fasilitas kepariwisataan atau amenities meliputi berbagai elemen, seperti akomodasi, restoran, transportasi lokal, fasilitas rekreasi, hingga layanan kesehatan. Keberadaan fasilitas yang memadai tidak hanya memberikan kenyamanan bagi wisatawan, tetapi juga mendorong mereka untuk tinggal lebih lama dan memberikan kontribusi ekonomi yang lebih besar bagi destinasi. Dalam konteks Kabupaten Muna, penyediaan fasilitas seperti akses jalan yang baik, penginapan, tempat makan, dan pusat informasi wisata menjadi prioritas utama dalam mendukung pengembangan destinasi seperti Danau Napabale dan Pantai Walengkabola.

Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2022 menegaskan pentingnya penyediaan fasilitas yang mendukung pertumbuhan, kualitas, dan daya saing destinasi wisata. Hal ini sejalan dengan konsep Pitana (2005), yang menyebutkan bahwa penyediaan fasilitas kepariwisataan harus dirancang secara strategis untuk melengkapi atraksi wisata yang ada. Fasilitas ini harus disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan wisatawan, sehingga dapat menciptakan pengalaman yang lebih bermakna dan mendalam.

Selain itu, teori Sobari dalam Anindita (2015) menekankan bahwa fasilitas kepariwisataan harus memperhatikan aspek keberlanjutan. Ini berarti bahwa fasilitas yang disediakan harus ramah lingkungan, hemat energi, dan mendukung pelestarian budaya lokal. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Muna dapat berperan dalam menginisiasi pembangunan fasilitas yang berorientasi pada kelestarian lingkungan, seperti pengelolaan limbah, penggunaan

energi terbarukan, serta penyediaan fasilitas edukasi tentang keunikan destinasi wisata.

Pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk menjamin aksesibilitas yang baik ke fasilitas kepariwisataan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, aksesibilitas merupakan salah satu elemen penting dalam pengelolaan destinasi wisata. Ini mencakup kemudahan bagi wisatawan untuk mencapai lokasi wisata, baik melalui transportasi darat, laut, maupun udara, serta menyediakan fasilitas penunjang seperti jalur khusus untuk penyandang disabilitas.

Penyediaan fasilitas kepariwisataan juga harus memperhatikan kenyamanan dan keamanan wisatawan. Hal ini meliputi pembangunan fasilitas umum seperti toilet bersih, tempat ibadah, area parkir yang memadai, serta layanan kesehatan darurat di dekat lokasi wisata. Dengan fasilitas yang lengkap dan terintegrasi, wisatawan dapat merasa lebih nyaman dan aman saat mengunjungi destinasi di Kabupaten Muna.

Dalam upaya menyediakan fasilitas kepariwisataan, Pemerintah Daerah Kabupaten Muna diharapkan mampu menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan komunitas lokal. Pendekatan kolaboratif ini penting untuk memastikan bahwa fasilitas yang dibangun tidak hanya memenuhi kebutuhan wisatawan, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Selain itu, fasilitas ini harus dikelola dengan baik untuk memastikan keberlanjutan penggunaannya dalam jangka panjang.

Dengan penyediaan fasilitas kepariwisataan yang memadai dan berkualitas, destinasi wisata di Kabupaten Muna diharapkan dapat meningkatkan daya saingnya di tingkat nasional maupun internasional. Fasilitas ini tidak hanya menjadi penunjang utama dalam pengalaman wisatawan, tetapi juga menjadi indikator

keberhasilan pengelolaan destinasi wisata yang profesional dan berkelanjutan

Penyediaan fasilitas kepariwisataan di Kabupaten Muna merupakan upaya strategis yang melibatkan sinergi antara pemerintah, pengelola destinasi, dan masyarakat. Pemerintah daerah memprioritaskan peningkatan infrastruktur jalan dan pengembangan layanan transportasi, bekerja sama dengan instansi terkait, untuk mempermudah aksesibilitas wisatawan ke destinasi unggulan seperti Danau Napabale dan Pantai Walengkabola. Selain itu, penyediaan fasilitas informasi wisata dalam bentuk pusat informasi dan inovasi digital menjadi elemen penting untuk memberikan panduan dan meningkatkan daya tarik destinasi. Pengelola destinasi menyoroti pentingnya pembangunan fasilitas penunjang seperti parkir, toilet umum, dan rest area untuk kenyamanan wisatawan. Masyarakat sekitar juga menekankan perlunya transportasi umum yang memadai agar manfaat pariwisata dapat dirasakan secara langsung, terutama melalui peluang usaha mikro. Dengan pendekatan yang kolaboratif dan inklusif, pengembangan fasilitas kepariwisataan diharapkan mampu meningkatkan daya tarik destinasi sekaligus memberikan dampak ekonomi yang positif bagi masyarakat lokal.

Meningkatkan Aksesibilitas

Aksesibilitas pariwisata merupakan salah satu elemen penting dalam pengembangan destinasi wisata yang berkelanjutan. Aksesibilitas tidak hanya mencakup kemudahan mencapai destinasi wisata, tetapi juga melibatkan penyediaan infrastruktur transportasi, informasi, dan komunikasi yang mendukung kenyamanan wisatawan. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2021–2036, peningkatan aksesibilitas disebut sebagai bagian strategis dari pengembangan destinasi wisata, untuk memastikan bahwa

destinasi mudah diakses oleh wisatawan baik dari dalam maupun luar daerah.

Menurut Cooper dkk (1993), aksesibilitas pariwisata melibatkan kemudahan transportasi ke lokasi wisata, serta tersedianya jalur dan fasilitas yang memadai untuk mendukung pergerakan wisatawan. Aksesibilitas yang baik meningkatkan daya tarik suatu destinasi, karena wisatawan dapat mencapai lokasi tanpa menghadapi hambatan yang berarti. Dalam konteks Kabupaten Muna, peran Pemerintah Daerah sangat penting dalam memastikan bahwa infrastruktur transportasi, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara, dikembangkan untuk mendukung mobilitas wisatawan.

Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2022 menegaskan bahwa peningkatan aksesibilitas pariwisata mencakup kemudahan menuju destinasi wisata serta kenyamanan dan keamanan wisatawan selama perjalanan. Infrastruktur seperti jalan menuju Danau Napabale dan Pantai Walengkabola, misalnya, harus ditingkatkan untuk mempermudah akses wisatawan. Selain itu, penyediaan sistem transportasi publik yang terintegrasi dan terjangkau juga menjadi aspek penting untuk mendukung aksesibilitas pariwisata.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata juga menekankan bahwa aksesibilitas harus mempertimbangkan prinsip inklusivitas, sehingga destinasi wisata dapat diakses oleh semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas. Hal ini meliputi penyediaan jalur khusus, fasilitas transportasi ramah disabilitas, serta informasi yang mudah diakses oleh wisatawan.

Selain infrastruktur fisik, aksesibilitas informasi juga menjadi fokus dalam pengembangan pariwisata. Menurut Pitana (2005), penyediaan informasi yang jelas dan akurat tentang destinasi wisata, seperti rute perjalanan, peta, dan panduan, sangat penting untuk mendukung pengalaman wisatawan. Pemerintah Daerah Kabupaten

Muna dapat memanfaatkan teknologi digital, seperti aplikasi peta wisata, situs web, atau media sosial, untuk memberikan informasi yang relevan kepada wisatawan.

Peningkatan aksesibilitas pariwisata juga harus dilakukan dengan memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. Menurut teori Sobari dalam Anindita (2015), pembangunan infrastruktur untuk mendukung aksesibilitas tidak boleh merusak ekosistem lokal. Misalnya, pembuatan jalur transportasi menuju destinasi wisata harus dilakukan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan sekitar, seperti hutan, pantai, dan ekosistem perairan.

Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan sektor swasta dan masyarakat lokal sangat penting dalam meningkatkan aksesibilitas pariwisata. Melalui kolaborasi ini, pemerintah dapat memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam mendukung pengembangan infrastruktur transportasi dan komunikasi yang diperlukan. Selain itu, partisipasi masyarakat juga membantu dalam menjaga kelestarian infrastruktur yang telah dibangun.

Dengan meningkatkan aksesibilitas pariwisata, Kabupaten Muna diharapkan dapat meningkatkan daya saing destinasi wisata serta menarik lebih banyak wisatawan, baik domestik maupun internasional. Aksesibilitas yang baik tidak hanya memberikan kemudahan bagi wisatawan untuk mencapai lokasi, tetapi juga menciptakan pengalaman perjalanan yang nyaman dan aman. Hal ini pada akhirnya akan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan sektor pariwisata serta kesejahteraan masyarakat lokal.

Meningkatkan aksesibilitas pariwisata di Kabupaten Muna merupakan upaya strategis yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, pengelola destinasi, dan masyarakat sekitar. Pemerintah, melalui kerjasama dengan instansi terkait, fokus pada peningkatan infrastruktur jalan dan

pengembangan transportasi terintegrasi untuk mempermudah mobilitas wisatawan. Pengelola destinasi menekankan pentingnya fasilitas informasi wisata yang edukatif dan mendukung navigasi pengunjung, baik melalui media fisik maupun teknologi digital. Selain itu, fasilitas penunjang seperti parkir, toilet, rest area, dan pos pengawasan menjadi elemen penting untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan wisatawan. Masyarakat sekitar turut menggarisbawahi perlunya transportasi umum yang terjangkau dan terhubung langsung dengan destinasi wisata untuk mendorong kunjungan serta membuka peluang usaha lokal. Secara keseluruhan, aksesibilitas yang lebih baik diharapkan dapat mendukung pertumbuhan sektor pariwisata yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah.

Menciptakan Peluang Usaha Jasa Kepariwisata

Menciptakan peluang jasa usaha kepariwisataan masyarakat merupakan salah satu langkah strategis dalam mengintegrasikan pengembangan pariwisata dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2021–2036, pengembangan pariwisata tidak hanya difokuskan pada peningkatan destinasi, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat untuk terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi berbasis pariwisata.

Menurut teori Pitana (2005), partisipasi masyarakat lokal dalam kegiatan pariwisata tidak hanya meningkatkan penghasilan mereka, tetapi juga mendorong terciptanya hubungan yang lebih erat antara wisatawan dan komunitas lokal. Peluang jasa usaha kepariwisataan dapat mencakup berbagai bentuk, seperti penyediaan akomodasi homestay, jasa pemandu wisata, persewaan alat transportasi, kuliner lokal, hingga

penyediaan cinderamata khas daerah. Dalam konteks Kabupaten Muna, peluang ini dapat dimanfaatkan dengan mengembangkan produk berbasis kearifan lokal, seperti kerajinan tradisional atau makanan khas.

Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2022 menekankan bahwa pengembangan peluang usaha kepariwisataan harus berbasis pada potensi sumber daya lokal di sekitar destinasi wisata. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat lokal dapat merasakan manfaat langsung dari pengembangan pariwisata. Misalnya, di sekitar Danau Napabale dan Pantai Walengkabola, masyarakat setempat dapat diberdayakan untuk menyediakan layanan seperti penyewaan perahu, penjualan makanan ringan, atau jasa fotografi.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, sektor pariwisata memiliki potensi besar untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Muna memiliki tanggung jawab untuk menyediakan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat agar mereka dapat mengelola usaha kepariwisataan dengan baik. Langkah ini sejalan dengan teori Sobari dalam Anindita (2015), yang menyebutkan bahwa pengembangan usaha pariwisata harus disertai dengan peningkatan kapasitas masyarakat, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun akses ke sumber daya.

Selain itu, kolaborasi antara Pemerintah Daerah, sektor swasta, dan masyarakat lokal menjadi kunci dalam menciptakan peluang jasa usaha kepariwisataan. Pemerintah dapat memfasilitasi pengembangan usaha melalui penyediaan modal, pelatihan kewirausahaan, serta bantuan dalam pemasaran produk lokal. Sementara itu, sektor swasta dapat berperan dalam membuka jaringan distribusi produk masyarakat ke pasar yang lebih luas.

Peluang jasa usaha kepariwisataan masyarakat juga harus dikelola dengan pendekatan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Menurut Cooper dkk (1993), pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat harus mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan sekitar, sehingga kegiatan usaha yang dilakukan tidak merusak ekosistem lokal. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pariwisata dapat terus memberikan manfaat dalam jangka panjang.

Dengan menciptakan peluang jasa usaha kepariwisataan masyarakat, Kabupaten Muna tidak hanya dapat meningkatkan daya tarik destinasi wisata, tetapi juga memberdayakan masyarakat lokal untuk menjadi pelaku utama dalam pengembangan sektor ini. Melalui pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan, peluang ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Menciptakan peluang jasa usaha kepariwisataan masyarakat di Kabupaten Muna memerlukan pendekatan yang melibatkan berbagai pihak. Pemerintah berperan aktif dalam mendorong keterlibatan masyarakat lokal melalui pelatihan dan fasilitasi untuk mengembangkan keterampilan yang relevan dengan industri pariwisata. Pengelola destinasi wisata turut membuka peluang usaha seperti penyewaan alat rekreasi, kios makanan, penginapan, dan penjualan souvenir untuk memberdayakan masyarakat setempat. Selain itu, masyarakat diajak memanfaatkan potensi alam dan budaya lokal sebagai dasar untuk menciptakan usaha yang inovatif dan berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan taraf ekonomi masyarakat tetapi juga memperkuat rasa memiliki terhadap destinasi wisata. Secara keseluruhan, kolaborasi antara pemerintah, pengelola, dan masyarakat menciptakan

ekosistem pariwisata yang inklusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal

KESIMPULAN

Pemerintah Daerah Kabupaten Muna telah menjalankan perannya dalam pengembangan destinasi wisata melalui upaya mewujudkan atraksi wisata, menyediakan fasilitas kepariwisataan, meningkatkan aksesibilitas, serta menciptakan peluang usaha jasa kepariwisataan bagi masyarakat. Peran tersebut dilakukan melalui pengembangan potensi wisata alam dan budaya, penyelenggaraan kegiatan promosi, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, serta pemberdayaan masyarakat lokal dalam kegiatan ekonomi berbasis pariwisata.

Dalam aspek atraksi wisata, pemerintah telah berupaya mengembangkan dan mempromosikan destinasi unggulan seperti Danau Napabale dan Pantai Walengkabola melalui berbagai kegiatan budaya dan promosi pariwisata. Pada aspek fasilitas kepariwisataan dan aksesibilitas, pemerintah terus melakukan peningkatan infrastruktur pendukung seperti jalan, fasilitas umum, pusat informasi wisata, dan sarana transportasi guna meningkatkan kenyamanan wisatawan. Sementara itu, pada aspek peluang usaha jasa kepariwisataan, masyarakat mulai dilibatkan melalui pengembangan usaha mikro, penyediaan jasa wisata, penjualan produk lokal, serta kegiatan ekonomi kreatif yang mendukung sektor pariwisata.

DAFTAR PUSTAKA

- A.J.,Muljadi (2010). *Kepariwisataan dan Perjalanan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Anindita, (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kunjungan Ke Kolam Renang Boja. Semarang. jurnal ekonomi Universitas Diponegoro

- Arif dan Adhawati (2012;9). Peran dan Fungsi pemerintah
- A.Yoeti, oka. dkk (2006). Pariwisata Budaya Masalah dan Solusinya. PT. Pradnya Paramita
- Bambang Sunaryo. (2013). Kebijakan Pembangunan Destinasi Pagriwisata. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Chafid Fandeli. 1995. "Dasar-Dasar Manajemen Kepariwisata Alam". Liberty Offset, Yogyakarta.
- Cooper, William D. 1993. Instrumentasi Elektronik dan Teknik Pengukuran. Edisi Kedua. Terjemahan S. Pakpahan. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Creswell, John W. (2007) Qualitative Inquiry & Research Design Choosing Among Five Approaches. California: Sage Publication Inc
- Creswell, John W, 2014, Penelitian Kualitatif & Desain Riset, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Dwyer, L., Forsyth, P., and Rao, P. 2000. The price competitiveness of travel and tourism: A comparison of 19 destinations. *Tourism Management*, 21 (1), 9-22.
- European Commission, 2003. Responsible Entrepreneurship: a Collection of Good Practice Cases Among Small and Medium Sized Enterprises across Europe.
- Fandeli, Chafid. 2001. "Dasar-dasar Manajemen Kepariwisata Alam". Yogyakarta: Liberty
- Kesuma, S. dan Yennina, R. 2015. Antioksidan Alami Dan Sintetik. Padang. Andalas University Press. 98 hal.
- Kaho Josef Riwu. 1997. Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia. Grafindo Persada. Jakarta.
- Leech, Geoffrey. 1993. Prinsip-prinsip Pragmatik. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Mudrajad, Kuncoro. 2005. Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif. Erlangga. Jakarta
- Pendit, Nyoman S. 1986. Ilmu Pariwisata: Sebuah Pengantar Perdana. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Peraturan Bupati Muna Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muna
- Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan kepariwisataan Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021-2036
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisatawan
- Pitana, I. G. (2005). Sosiologi Pariwisata, Kajian Sosiologis terhadap Struktur, Sistem, dan Dampak-Dampak Pariwisata. Yogyakarta: Andi Offset.
- Pitana, I. Gede, and I. Ketut Surya Dirata Dirata. 2019. Pengantar Ilmu Pariwisata. edited by S. Suyantoro. Yogyakarta: Andi Offset.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1995. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: PT. Balai Pustaka
- Soekanto, Soerjano. 2006. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soekanto, Soerjono 1987 Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat. Hal 220
- S Pendit, Nyoman. 2003. Ilmu Pariwisata. Jakarta: PT. Pradnya Paramita
- Subadra, I.N. 2008. Ekowisata sebagai Wahana Pelestarian Alam. Bali. [Online], <http://Bali Tourism Watch Ekowisata sebagai Wahana Pelestarian Alam « Welcome to Bali Tourism Watch.htm> [diakses tanggal 12 November 2019].
- Susan, Stainback. (1988). Understanding & Conducting Qualitative Research. Kendall/Hunt Publishing Company ; Dubuque, Iowa. Sebagaimana dikutip oleh Sugiyono dalam bukunya yang

- berjudul “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D”. CV. Alfabeta, Bandung 2013, hlm 241.
- Suwantoro, Gamal. 1997. Dasar-dasar Pariwisata. Yogyakarta: Andi Offset
- Suwantoro, Gamal. 2004. Dasar-dasar Pariwisata. Penerbit Andi Yogyakarta
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang No 25 Tahun 2000 tentang program Pembangunan Nasional
- Waskito, A. 2013. Siklus Hidup dan Demografi Kumbang Lembing *Henospilachna vigintioctopunctata* Fabricius (Coleoptera: Coccinellidae) Pada Tanaman Inang Yang Berbeda. Bogor: Institut Pertanian Bogor
- Yoeti, Oka A, 2008. Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata. Pradnya Paramita: Jakarta.
- Yin, R. K. (2009). “Case Study Research: Design and Method” (4rd ed.). California: Sage Publications, Inc